

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dampak penyebaran narkotika yang berskala global hingga masuk ke Indonesia, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna narkotika baik di tingkat dunia maupun nasional. Dalam peredarannya, terdapat pihak-pihak yang berperan sebagai perantara dalam menyalurkan narkotika kepada para pengguna. Studi ini juga membahas peran kejaksaan dalam menangani pelaku yang bertindak sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika di Sumatera Utara.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan berdasarkan data yang diperoleh dari pengalaman dan pengamatan langsung, baik melalui observasi, eksperimen, maupun survei. Pendekatan ini digunakan untuk menguji teori serta memahami dan menggali fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dibangun pengetahuan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki peran penting sebagai pihak yang berwenang dalam menangani tindak pidana narkotika, khususnya sebagai penuntut umum di pengadilan. Kejaksaan bertanggung jawab dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana, termasuk peran pelaku sebagai perantara, serta menuntut hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jaksa menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan, menghadirkan alat bukti, dan mengajukan tuntutan yang dianggap tepat terhadap pelaku. Selain itu, kejaksaan juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan, baik berupa pidana penjara maupun sanksi hukum lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, kejaksaan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, dan instansi terkait lainnya guna memastikan penanganan perkara yang efektif dan menyeluruh.

Kata Kunci : Peran Kejaksaan Dalam Menangulangi Pelaku Perantara Kejahatan Narkotika Di Sumatera Utara

## ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the impact of the global distribution of narcotics, including its entry into Indonesia, as evidenced by the increasing number of drug users both globally and nationally. In this circulation, there are parties who act as intermediaries in distributing narcotics to users. This study also discusses the role of the prosecutor's office in handling perpetrators who act as intermediaries in narcotics crimes in North Sumatra.

This research uses an empirical method with an approach based on data obtained from experience and direct observation, including through observation, experiments, and surveys. This approach is used to test theories and understand and explore phenomena occurring in the field, allowing conclusions to be drawn and knowledge to be built. Furthermore, this research also utilizes qualitative analysis by collecting data from various sources, such as books and articles relevant to the research topic.

The results indicate that the prosecutor's office plays a crucial role as the authorized party in handling narcotics crimes, particularly as a public prosecutor in court. The prosecutor's office is responsible for proving the elements of the crime, including the perpetrator's role as an intermediary, and demanding punishment in accordance with applicable law. Prosecutors draft indictments based on the results of investigations, present evidence, and file charges deemed appropriate against perpetrators. Furthermore, the prosecutor's office plays a role in overseeing the implementation of court decisions, whether in the form of imprisonment or other legal sanctions. In carrying out its duties, the prosecutor's office collaborates with the National Narcotics Agency (BNN), the police, and other relevant agencies to ensure effective and comprehensive case handling.

**Keywords:** The Role of the Prosecutor's Office in Combating Intermediary Perpetrators of Narcotics Crime in North Sumatra